

## KRITIK SOSIAL GEREJA KEPADA NEGARA MENURUT KACAMATA MICHAEL WALZER

Kolsinus Kalven Benu<sup>1</sup>

### *Abstract*

The church's social criticism of the State from the development of the early church until the church reformation period, the New Order era, and even the Indonesian reformation order have not run optimally. This is due to the church's closeness to the State to free itself from minority feelings, to be free from suffering and persecution, and to fight for the interests of the church. The such closeness makes it difficult for the church to voice social criticism. This paper intends to rebuild the understanding of the church's social criticism of the State, in light of Michael Walzer's thoughts. According to Walzer, the church needs to have a socially critical attitude towards the government, to convey social criticism. This critical distance helps the church to be free from emotional ties and the influence of certain ideologies with the government to be free to express criticism, especially ahead of general elections and regional head elections. Instead, the church positions itself with marginalized communities and fights for their politics.

*Keywords:* Social Criticism, Church Politics, Church-State, Michael Walzer.

### *Abstrak*

Kritik sosial gereja terhadap Negara sejak perkembangan gereja mula-mula sampai masa reformasi gereja, masa orde baru, bahkan orde reformasi Indonesia belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kedekatan gereja terhadap Negara untuk membebaskan diri dari perasaan minoritas, bebas dari penderitaan dan penganiayaan, serta memperjuangkan kepentingan gereja. Kedekatan yang demikian membuat gereja sulit untuk

---

<sup>1</sup> Pendeta Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor.

menyuarakan kritik sosial. Tulisan ini bermaksud membangun kembali pemahaman kritik sosial gereja terhadap Negara, dalam terang pemikiran Michael Walzer. Menurut Walzer, gereja perlu memiliki sikap jarak kritis sosial terhadap pemerintah, agar dapat menyampaikan kritik sosial. Jarak kritik tersebut menolong gereja untuk bebas dari ikatan emosional dan pengaruh ideologi tertentu dengan pemerintah untuk bebas menyampaikan kritik, terlebih menjelang pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah. Sebaliknya gereja menempatkan diri bersama masyarakat yang terpinggirkan dan memperjuangkan politik mereka.

*Kata-kata kunci:* Kritik Sosial, Politik Gereja, Gereja-Negara, Michael Walzer.

## PENDAHULUAN

Tentu belum hilang dari ingatan kita cerita tentang Bung Tomo, seorang pahlawan yang pernah dipenjarakan oleh Soeharto. Pada tahun 1978, Siti Hartinah, istri mantan Presiden Soeharto, ketika sedang sibuk merancang pembangunan TMII. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Bu Tien meminta para pengusaha memberikan 10 persen keuntungan usahanya untuk pembangunan TMII. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII itu dalam setiap pidatonya. Pada 11 April 1978, Bung Tomo pun ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan, lalu di Penjara Nirbaya, Pondok Gede. Turut mendekam dalam jeruji di sana, pakar hukum tata negara Ismail Sunny yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru.<sup>1</sup>

Sepenggal cerita di atas mewakili sejumlah kisah tentang kediktatoran Soeharto dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun. Ia tidak menerima kritikan, apalagi yang namanya oposisi ia tidak kenal. Ia tahu yang namanya kontrol sosial, tetapi perbedaan pendapat terhadap kebijakannya ia tidak suka. Anti-Soeharto berarti anti pancasila. Demikian ia mencap orang yang menentangnya.<sup>2</sup> Media massa menjadi tidak bebas dalam menyampaikan berita. Semuanya dikontrol untuk mengokohkan politik Soeharto. Tanah rakyat dirampok, harta Negara dikuasai, kemanusiaan dibonsai, sementara masyarakat dibungkam dan tidak mampu melawan atau memberdayakan diri. Gereja pada masa itu juga tidak mampu menyuarakan suara kenabiannya.

Apalagi orang Kristen adalah kelompok minoritas. Media BBC menyebut Soeharto sebagai seorang “penindas yang kejam” dan “diktator yang sukses”.<sup>3</sup> Namun Idi S. Ibrahim menyebut politik orde baru itu sebagai “politik tata tenteram” yang palsu.<sup>4</sup> Pada masa Presiden Soeharto, sistem kekuasaan telah membagi tiga cabang kekuasaan dengan pembatasan yang jelas antara eksekutif yang menjalankan pemerintahan, legislatif yang menjalankan tugas perwakilan rakyat dan yudikatif sebagai pengawal implementasi hukum. Sekali pun sudah dibagi dengan sedemikian rupa, Indonesia pernah ada dimasa pemerintahan itu dengan mencampuradukkan ketiganya. Hal ini sangat menyulitkan untuk mengajukan kritik sosial, sebab tidak ada jarak politik yang dilakukan ketika kekuasaan dicampuradukkan. Kini bangsa Indonesia ada di zaman Reformasi. Ada keterbukaan untuk menyampaikan kritik sosial. Namun tidak dipungkiri bahwa sistem politik Orde Baru masih tampak melalui pemimpin-pemimpin daerah yang bersikap diktator dan anti terhadap kritik sosial, baik oleh media massa maupun oleh masyarakat. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh Bupati dan salah satu Camat kepada seorang wartawan di Kabupaten Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur.<sup>5</sup> Fakta-fakta di atas mengantar kita pada pertanyaan bagaimana memahami kritik sosial? Bagaimana menyampaikannya? Dari mana prinsip-prinsip kritik sosial? Bagaimana membangun relasi dengan Negara yang dikritik? Nilai apa yang diperjuangkan oleh gereja saat menyampaikan kritik sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini akan diulas berdasarkan teori ‘kritik sosial’ dari Michael Walzer. Kemudian akan dipaparkan relasi gereja dan Negara berkaitan dengan kritik sosial sejak masa perkembangan gereja, masa reformasi gereja pada abad pertengahan dan orde baru serta orde reformasi di Indonesia. Diakhiri tulisan ini akan menawarkan suatu pemahaman tentang kritik sosial yang bersifat terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam kehidupan bergereja dan bernegara di zaman sekarang ini.

## **PEMBAHASAN**

### ***Mengenal Michael Walzer dengan Teori Kritik Sosialnya***

Michael Laban Walzer lahir pada 3 Maret 1935 di kota New York, Amerika. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Brandeis, Universitas Harvard, dan Cambridge University. Walzer merupakan seorang pakar teori politik dan intelektual publik Amerika Serikat yang sangat

berpengaruh. Ia juga seorang profesor emeritus di *Institute for Advanced Study*, Princeton, New Jersey, dan juga penyunting sebuah majalah intelektual. Pemikiran-pemikirannya terpengaruh oleh Karl Marx, Charles Taylor, Niccolo Machiavelli, Isaiah Berlin, dan Albert Camus. Karyanya yang terkenal seperti *Interpretation and Social Criticism*, *Just and Unjust Wars*, *Spheres Justice*, dan beberapa yang lain. Untuk teori kritik sosial dalam tulisan ini, diambil dari karya yang pertama di atas.

Michael Walzer menyebut kritik sosial sebagai praktik sosial, yakni hal yang ada dalam masyarakat, dan berfungsi untuk melakukan interpretasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sering kali tidak benar. Ia berdiri untuk menyuarakan apa yang benar. Suatu kegiatan yang umum, yang tidak menunggu sampai adanya penemuan filosofis atau intervensi tertentu. Ia merupakan suatu kegiatan sosial yang memiliki fungsi pronominal dan reflektif.<sup>6</sup> Untuk melakukan kritik sosial diperlukan interpretasi. Interpretasi merupakan bagian dari filsafat moral yang berhubungan dengan pengalaman hidup sehari-hari setiap orang ketika mengamati suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang tertentu. Interpretasi yang baik harus bersifat objektif tanpa intervensi pihak-pihak tertentu dan bebas dari berbagai macam kepentingan. Hal ini yang akan melahirkan suatu refleksi dalam diri untuk melakukan kritik sosial. Kritik sosial ditujukan ketika suatu produk hukum atau teks-teks agama dipakai oleh segelintir orang untuk menindas atau merugikan pihak yang lain. Maka kritik sosial dipakai untuk mengingatkan akan bahaya atau dampak buruk yang akan terjadi. Misalnya pembangunan Tambang dan Bendungan di Desa Wadas, Purworejo-Jawa Tengah, yang berpotensi merusak lingkungan alam dan menggusur kebun-kebun petani. Hal ini dalam bahasa Karl Marx termasuk ideologi kapitalis yang dipakai pemerintah untuk menindas masyarakat kecil. Maka masyarakat perlu menyuarakan kritik sosial mereka.

Latar belakang pemikiran Michael Walzer dalam mengemukakan teori kritik sosial adalah ketika moralitas tidak dilaksanakan dan terjadi ketidakadilan dalam sistem sosial masyarakat. Contoh sederhana, ia mengutip pandangan sinis Profesor Nagel dengan suatu pertanyaan skeptis, Apa alasan yang mungkin saya bersikap untuk tidak acuh tak acuh terhadap rasa sakit tetangga saya? Alasan apa yang bisa saya miliki untuk merawat, bahkan

sedikit?<sup>7</sup> Pertanyaan ini berangkat dari pengalaman hidup sehari-hari, dan muncul dari suatu kesadaran moral bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah.” Tanpa kesadaran moral terhadap situasi sosial, orang tidak mungkin memiliki kritik sosial. Jadi kesadaran moral melahirkan interpretasi untuk melakukan kritik sosial. Walzer memakai istilah *upholster* (Istilah yang berarti: *provide (furniture) with a soft, padded covering*). Dengan melihat kembali pada masa lalu, maka kita akan mengetahui banyak ketidakadilan yang menindas. Masa lalu menjadi penting bagi kita untuk bercermin dan menumbuhkan sikap kekritisannya. Maka sikap kritis harus menjadi budaya moral yang tidak berhenti, tetapi terus menerus dilakukan, termasuk kritik sosial atas sesuatu yang telah diinterpretasi. Terhadap fenomena yang telah berlalu, kita tidak bisa melangkah ke belakang, tetapi apa yang ada saat ini, itulah yang dapat kita respon. Dari masa lalu kita memperoleh warisan nilai-nilai yang membentuk masyarakat tertentu secara khusus, termasuk kita yang ada di dalamnya, itulah yang perlu kita tata dengan makna yang baru.

Berkaitan dengan pemahaman di atas, Walzer mengemukakan suatu hal penting yakni ia menolak prinsip-prinsip etika yang universal yang dianut oleh kaum liberalisme (Immanuel Kant). Walzer lebih menganjurkan agar orang memiliki pegangan yang kuat pada nilai budaya di tingkat lokal. Sebab hal itu yang akan menentukan dan menjadi nilai normatif untuk tiba pada kesepakatan bersama melalui dialog dalam ruang publik. Dalam konteks masyarakat plural ada persoalan untuk menerapkan moral universalistik jika tidak memiliki pegangan yang kuat pada moralitas lokal. Lebih dalam, Walzer mengatakan bahwa manusia secara otonom menetapkan prinsip-prinsip moral. Ia tidak menetapkannya, melainkan ia menemukannya. Prinsip-prinsip moral hanya ditemukan dalam sebuah masyarakat, itu tidak berarti bahwa moralitas sebuah masyarakat tidak dapat dikritik. Cara untuk mengkritiknya ialah melalui interpretasi. Interpretasi yang dimaksudkan ialah mengajukan kritik dalam bahasa, dalam kebiasaan, dan tradisi masyarakat tertentu.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam praktik, Walzer mengemukakan bahwa kritik yang baik membutuhkan jarak kritis terhadap negara. Semakin dekat kita mengidentifikasi diri dengan negara, maka semakin sulit bagi kita untuk

mengenali atau mengakui, dan bahkan mengemukakan kesalahan yang dibuat oleh negara. Pandangan Walzer tersebut terlihat radikal tetapi ia mengatakan bahwa yang namanya kritik adalah kegiatan eksternal. Oleh karena itu, *Pertama*, para kritikus harus terlepas secara emosional, terlepas dari keintiman dan kehangatan keanggotaan: tidak tertarik dan tidak puas. *Kedua*, para kritikus harus terpisah secara intelektual, terlepas dari pemahaman parokial (yang bersifat pasif terhadap keadaan) tentang masyarakat mereka sendiri, berpikiran terbuka dan obyektif. Walzer melihat bahwa hal ini agak sulit, bahkan menakutkan, tetapi ada prestasi yang akan diperoleh demi kenyamanan dan solidaritas.<sup>9</sup>

Jadi jarak kritis yang dimaksudkan oleh Walzer ialah bertujuan menolong orang yang melakukan kritik sosial tidak berada di bawah tekanan atau perasaan psikologis apa pun oleh karena keterikatan secara emosional. Demikian juga tidak terpengaruh dengan berbagai macam ideologi yang membungkam suara-suara yang seharusnya bersuara. Termasuk suara kebanyakan yang mempertahankan *status quo* atau bersikap pasif terhadap krisis sosial, sebab sering kali bertentangan dengan pemahaman diri seseorang yang kritis. Mengapa perlu jarak kritis? Karena tugas kritik sosial itu menantang para pemimpin dan pembuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik. Banyak orang termasuk Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan lembaga agama tidak dapat menyampaikan kritik sosial terkait ketidakadilan oleh karena faktor kedekatan mereka dengan pemerintah. Disinilah pentingnya jarak kritis dalam kritik sosial. Akan tetapi menjadi catatan bahwa, jarak kritis yang dimaksudkan oleh Walzer berarti seseorang tidak harus benar-benar terlepas dari komunitas, dan menjadi terasing/termarginal. Seseorang yang melakukan kritik sosial harus tetap ada dalam keterhubungan dengan komunitas yang diinterpretasikannya, dengan tetap menjaga jarak kritisnya sehingga melahirkan sikap yang objektif. Seorang kritikus bisa dapat datang dari luar, tetapi ia harus masuk ke dalam, ke dalam praktik dan kehidupan masyarakat sebelum mengkritik. Kritik sosial hanya dapat menjadi efektif apabila ia menjadi kritik yang terhubung (*connected critic*) dengan komunitas yang diinterpretasikannya. Maka orang yang menyampaikan kritik sosial baik adalah orang yang mengenal asal dan budaya masyarakatnya dengan baik.

Indikasi dari kritik sosial yang efektif ialah munculnya pemahaman akan makna dari produk-produk sosial. Demikian juga dengan prinsip-prinsip kritik yang dipakai bisa diambil dari pemahaman intelektual yang luas, global tetapi tindakannya harus bersifat lokal. Ia memberikan contoh tentang sikap kritis seperti Carl Schurz di Senat A.S. pada tahun 1872, kebenaran dan kesalahan kebijakan Negara. Ketika negara berperilaku buruk, itu masih milik kita, dan kita wajib mengkritik kebijakannya. Tidak perlu menarik diri dan menjauhi Negara atau bersikap apatis ketika ada ketidakadilan dalam masyarakat. Keterhubungan dengan Negara atau komunitas secara terus-menerus yang dapat memungkinkan kita untuk menyampaikan kritik sosial. Walzer juga mencontohkan peran nabi (terutama nabi Amos) pada zamannya mengkritik situasi sosial masyarakatnya, yang melakukan penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di bangsa Israel. Kebenaran dan keadilan tidak lagi menjadi nilai kehidupan bagi bangsanya. Pada waktu itu terjadi suap di pengadilan, manipulasi dan perampasan hak orang miskin dan ketidakadilan diputarbalikkan. Amos menyuarakan hendaknya keadilan menjadi nyata dalam hidup manusia.

Walzer juga sedikit menyentuh kritik sosial yang biasa dilakukan oleh kelompok minoritas/ marginal. Terkadang kelompok minoritas/marginal melakukan kritik sosial karena memiliki kesulitan-kesulitan tertentu dalam kehidupan. Jika kesulitan itu diatasi, ada rasa bebas dan aman, maka mereka akan kehilangan daya kritis mereka. Bagi Walzer hal ini menyimpang dari tujuan kritik sosial yang sebenarnya. Bukan hanya itu, kelompok minoritas yang demikian dekat dengan penguasa dalam masyarakat akan meremehkan kapasitasnya untuk menemukan suatu penilaian yang obyektif atas krisis sosial.<sup>10</sup> Jadi Walzer mau menegaskan kembali motivasi yang biasa dilakukan oleh kelompok minoritas/marginal dalam melakukan kritik sosial. Apakah hanya untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sendiri atau kepentingan umum. Walzer menganjurkan tidak perlu menempel pada penguasa (kembali menegaskan jarak kritis di atas), sebab pada diri kelompok minoritas ada *power*/kapasitas yang dapat dikembangkan untuk kebaikan bersama. Bukan minoritas-mayoritas yang dipersoalkan. *Power*/kapasitas itu merupakan suatu modal untuk melakukan kritik sosial secara objektif, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Berdasarkan penjelasan tentang teori kritik sosial dari Michael Walzer di atas, kiranya menjadi bahan bagi kita untuk melihat praktik kritik sosial yang selama ini dilakukan oleh gereja terhadap Negara dan berbagai fenomenanya untuk dicermati. Ada harapan bahwa teori kritik sosial tersebut menolong kita untuk menemukan pemahaman yang baik tentang praktik sosial, prinsip-prinsip yang mendasarinya, sikap yang harus dilakukan, dan nilai yang diperjuangkan.

### ***Kritik sosial gereja pada masa Reformasi Gereja***

Sejarah kekristenan menunjukkan bahwa jauh sebelum Reformasi, ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung berkuasa (306-337) mengatakan bahwa agama Kristen menjadi Agama negara. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai 'Kaisar umat Kristen' karena berhasil menghentikan penganiayaan bagi orang Kristen pada masa itu. Peranannya sangat mendominasi dalam gereja, sehingga berkat dukungan negara, gereja menjadi kaya raya, dan jumlah orang kristen melonjak. Akan tetapi ada yang hilang dalam gereja yakni sifat menyangkal diri, askese, dan kritik kepada kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Pada abad ke 16 di Eropa, adanya dukungan pemerintah terhadap reformasi Martin Luther, yang melahirkan gereja Lutheran, yang mempertahankan kaitan gereja dan negara. Yohanes Calvin sempat membentuk semacam teokrasi di Jenewa, tetapi kemudian ada pola hubungan baru dan juga menyesuaikan diri dengan prinsip pemisahan gereja dan negara dalam dunia modern. Luther mengatakan bahwa peran pemerintah hanya menjaga perdamaian dalam masyarakat dan tidak berurusan dengan pemaksaan hukum-hukum agama. Pandangan Luther tersebut melahirkan pemisahan agama dan negara. Ada perbedaan yang jelas antara yang sipil dan yang rohani, yang dikenal sebagai doktrin dua kerajaan.<sup>12</sup> Calvin melanjutkan ajaran dua kerajaan tersebut, bahwa manusia ada dalam dua pemerintahan, yang religius menuntut kesalehan dan penyembahan ilahi, sedangkan yang sipil diajarkan kewajiban-kewajiban yang mengikat untuk dilakukan.<sup>13</sup> Dalam praktiknya pengajaran Calvin ini bukan tanpa kritik sosial. Ia menafsirkan Kis 4:19-20 bahwa kita hanya menaati para pejabat dengan persyaratan bahwa mereka tidak menjatuhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Demikian juga terhadap Markus 12:13-17 tentang memberi kepada kaisar apa

yang kaisar punya dan kepada Allah apa yang Allah punya, - tetapi ada himbauan rasul Petrus untuk taat kepada Allah dan menghormati raja (1 Pet). Calvin melanjutkan bahwa ada ketaatan kepada pemerintah selalu disertai dengan ibadah dan takut kepada Allah. Akan tetapi penguasa tidak dapat ditaati jika melanggar kehendak Allah. Mengenai Roma 13 Calvin memahami bahwa pemerintah diberikan oleh Allah untuk kebaikan manusia, sekalipun pemerintah itu korup tetapi lebih baik ada pemerintah daripada anarki. Karena itu Calvin menganjurkan pemerintah untuk mendukung agama dan kesusilaan bagi masyarakat.<sup>14</sup> Calvin juga pernah menyinggung pemerintah yang pemimpin secara tirani, karena itu ia menganjurkan para pejabat yang dibawahnya untuk menggulingkan penguasa yang jahat dengan cara revolusi damai dan bertahap.<sup>15</sup> Dengan demikian jelas bahwa pada zaman reformasi gereja Martin Luther dan Yohanes Calvin meletakkan dasar secara teologis untuk gereja dapat melakukan kritik sosial kepada pemerintah, ketika pemerintah berlaku tidak adil dan bertindak diluar kehendak Allah. Kritik sosial yang dikemukakan bukan demi kepentingan gereja atau orang kristen saja, tetapi demi kebaikan masyarakat secara umum.

Ajaran Luther dan Calvin di atas menjadi dasar bagi Dietrich Bonhoeffer untuk mengkritik kekuasaan dan kejahatan partai *Nazi* di Jerman (1932-1934), dan juga kepada gereja yang terkesan bungkam terhadap pembantaian etnis Yahudi. Bagi Bonhoeffer, gereja tidak cukup hanya berbicara tentang perdamaian melalui mimbar, tetapi harus juga mengutuk konsep-konsep tentang kedaulatan mutlak negara, supremasisme, rasisme, dan ide tentang perang terhadap orang-orang Yahudi. Di mata Bonhoeffer, kebijakan-kebijakan partai *Nazi* dan Hitler bersifat *demonic*. Ia menganjurkan agar gereja harus membantu korban politik negara, tidak peduli ia orang kristen atau bukan. Tetapi bantuan kemanusiaan harus diberikan. Bagi Bonhoeffer, gereja-gereja di Jerman perlu melihat identitas diri mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus dan pola pikirnya dituntun oleh salib Kristus.<sup>16</sup> Bonhoeffer meminta gereja-gereja di Jerman untuk harus sanggup melakukan kritik sosial terhadap kebijakan-kebijakan rezim *Nazi* yang berlawanan dengan kehendak Kristus. Kritik sosial yang dikemukakan ditempatkan dalam pemahaman tentang anugerah keselamatan bagi manusia, oleh karena itu gereja tidak harus berkompromi dengan dunia yang jahat, tetapi melawannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kristus.

Kritik sosial yang ditunjukkan ini mengajarkan kita bahwa meskipun tidak semua persoalan dalam masyarakat kita selesaikan, tetapi sebagai gereja, menyuarkan kritik sosial adalah bagian dariewartakan kabar baik atau berita tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dunia.

### ***Kritik sosial gereja pada masa Orde Baru***

Berbeda dengan kritik sosial yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa, sikap gereja di Indonesia pada masa orde baru dapat dilihat dalam pandangan Emanuel Gerrit Singgih yang mengkritik model politik gereja. Pada orde baru gereja menempatkan orang dalam struktur pemerintahan, berlindung pada penguasa (wujud *minority complex*) dan memperjuangkan kepentingan gereja, termasuk kepentingan gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan saja.<sup>17</sup> Singgih menyebut Soeharto sebagai teman gereja, dan gereja berlindung pada teman tersebut untuk menyingkirkan perasaan minoritas sebagai orang Kristen di Indonesia. Perasaan minoritas ini bagaikan kuk yang harus dilepaskan. Meskipun Soeharto memimpin dengan diktator dan otoriter, namun hal itu lebih baik daripada Indonesia menjadi negara muslim. Karena itu Singgih menganalisa bahwa sebenarnya siapa yang memimpin tidak menjadi masalah bagi orang Kristen, asal bukan negara Islam. Istilah masyarakat sipil atau masyarakat madani dicurigai sebagai upaya masyarakat islam menjadikan orang kristen sebagai warga kelas dua. Sikap orang Kristen yang demikian, lebih nampak ketika tuntutan Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gereja bungkam dan tunduk pada tekanan pemerintah, ketika rakyat menderita karena krisis perekonomian menjelang reformasi, bahkan gereja melakukan kunjungan ke kediaman Presiden dengan membawa upeti, dengan alasan sebagai bentuk kunjungan pastoral.<sup>18</sup> Dapat dikatakan bahwa pada masa orde baru, perasan minoritas sebagai orang kristen, berlindung pada pemerintah, dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah membuat gereja kehilangan suara kritisnya. Tidak ada suara kenabian yang diungkapkan atas situasi sosial yang terjadi pada saat itu. Amos Sukanto mengutip pandangan T.B Simatupang yang menilai sikap gereja yang demikian dalam tiga bentuk: 1. Menjadi tercecce dan makin tidak mempunyai makna dalam proses perubahan masyarakat di lingkungannya; 2. Ikut-ikutan saja; 3. Dengan berpedoman kepada amanat yang dipercayakan kepadanya, gereja bisa

belajar dan memberikan sumbangan yang penuh makna bagi masyarakat yang sedang bergumul untuk membangun masa depan yang lebih baik.<sup>19</sup>

### ***Kritik sosial gereja pada masa Reformasi Indonesia***

Pada masa reformasi, Emanuel Gerrit Singgih mengungkapkan sikap gereja masih berhubungan dengan zaman orde baru. Ada tiga hal yang dikemukakan oleh Singgih mengapa gereja tidak menanggapi reformasi nasional Indonesia pada tahun 1998. Pertama, gereja menunggu peristiwa reformasi selesai baru menilai apakah peristiwa itu adalah kehendak Tuhan atau tidak. Yang dipegang ialah mendukung pemerintah sebab itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu gereja-gereja hanya melakukan seminar-seminar sambil memonitor apakah reformasi sudah selesai atau belum. Kedua, pengendalian yang berlebihan pada Roma 13 dan mengabaikan Wahyu 13 oleh gereja-gereja di Indonesia. Ketaatan kepada pemerintah dianggap sebagai ketaatan mutlak, yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan hingga masa itu. Mendukung reformasi sama dengan melakukan perlawanan kepada pemerintah. Ketiga, ada pemahaman terhadap “orang lain” dalam hal ini umat Islam. Ada perbedaan pandangan antara ‘orang lain’ dan ‘sesama’. Sesama adalah orang yang satu iman, satu gereja, satu suku, dsb. Sedangkan orang lain adalah orang yang berbeda dengan kita entah agamanya, sukunya, dsb. Hal ini agak berbeda dengan ungkapan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang Murah Hati (Lukas 10), bahwa sesama manusia itu adalah orang lain bahkan musuh.<sup>20</sup>

Ulasan Singgih di atas menunjukkan sikap kritik sosial gereja pada awal reformasi Negara tidak tampak sebab gereja masih terbawa oleh sikap kompromi dengan pemerintah. Sikap kompromi di sini menandakan bahwa gereja hanya mempertahankan *status quo* tanpa kesadaran moral untuk melakukan perubahan dalam Negara. Selain sikap kompromi di atas, kritik sosial gereja tidak tampak juga disebabkan oleh doktrin gereja dan pemahaman yang salah kaprah terhadap teks-teks Alkitab. Tafsiran terhadap teks-teks Alkitab yang bersifat tradisional juga turut mendukung hal ini. Jadi ada begitu banyak hal yang bersifat kompleks baik dari luar, maupun dari dalam gereja sendiri yang mempengaruhi gereja untuk tidak dapat menyampaikan kritik sosial terhadap Negara.

Secara individu, pada pemilihan umum tahun 2009, banyak pendeta dari berbagai gereja terlibat dalam politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (baik untuk pusat maupun daerah). Mereka mencalonkan diri dari berbagai partai politik baik partai Islam maupun Kristen. Terlepas dari banyak atau tidaknya dukungan orang Kristen kepada mereka, diizinkan oleh gereja asal atau tidak, namun layak untuk dilihat motivasi mereka terlibat dalam ‘politik praktis’. Nampaknya ada spirit kependetaan yang dibawa oleh para pendeta sebagai hamba Allah untuk terlibat dalam politik praktis, untuk melayani memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata lain keterlibatan pendeta dalam politik untuk menyuarakan suara kritis sosial gereja terhadap Negara, serta memperjuangkan ‘kepentingan Kristen’ atau kepentingan gereja, sebagaimana wacana umum yang berkembang dalam masyarakat.

Secara komunal, di setiap musim pemilihan umum, dukungan dari gereja-gereja terhadap calon legislatif tertentu juga disebabkan oleh adanya bantuan yang diberikan kepada gereja, entah uang atau bahan material lainnya, misalnya bahan bangunan gereja. Dukungan yang diberikan bukan karena sang calon mengusung kepentingan banyak orang dan nilai-nilai kekristenan, tetapi oleh karena ada sesuatu yang diperoleh. Katakanlah politik balas budi.

Politik kepentingan Kristen mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Abraham Kuyper di Belanda yang membangun masyarakat, supaya setiap kelompok membangun benteng-bentengnya untuk menjadi yang unggul dalam menentukan nasib keseluruhan masyarakat. Jadi ada kelompok-kelompok yang mendirikan partai politiknya sendiri, media beritanya sendiri, universitas sendiri, dsb.<sup>21</sup> Apa yang dilakukan oleh Kuyper di Belanda mirip dengan perjuangan orang Kristen untuk membebaskan diri dari perasaan minoritas dan terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan Kristen. Namun hal ini bisa jadi bukan suara kritik sosial gereja yang sesungguhnya. Sebab yang diperjuangkan adalah hanya kepentingan kelompok-kelompok, atau kepentingan minoritas. Kepentingan kelompok atau kepentingan minoritas berbeda dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bisa jadi juga hanya kepentingan pendeta secara individu atau

kepentingan gereja tertentu. Suara kritik sosial gereja yang sesungguhnya ialah kebenaran, keadilan, kebaikan dan kepentingan seluruh masyarakat.

## **PENUTUP**

### ***Kritik Sosial Gereja kepada Negara menurut kacamata Michael Walzer***

Berdasarkan uraian di atas tentang hubungan gereja dan Negara sejak awal kekristenan, masa reformasi gereja pada abad pertengahan, sampai masa orde baru dan reformasi Indonesia, maka dapat di analisa beberapa poin penting berdasarkan teori kritik sosial dari Michael Walzer.

*Pertama*, kehidupan orang Kristen pada awal perkembangan gereja, pada masa reformasi, bahwa zaman orde baru dan orde reformasi di Indonesia ada kemiripan meskipun tidak sama persis. Gereja yang berada dalam penindasan, penganiayaan, perasaan sebagai minoritas akan mencari perlindungan pada pemerintah. Relasi ketika agama Kristen sebagai agama Negara semakin menegaskan akan dominasi pemerintah atas gereja. Meskipun ada kenyamanan, jumlah orang Kristen bertambah, gereja menjadi kaya, ada utusan warga gereja yang ditempatkan dalam struktur pemerintahan, kepentingan gereja dijawab, akan tetapi gereja kehilangan suara kritisnya. Faktor kedekatan, ikatan emosional, rasa aman membuat gereja untuk tidak berpihak kepada masyarakat yang menderita. Ketika ada krisis sosial dalam masyarakat gereja menjadi bungkam dan tidak menyampaikan suara kenabiannya.

*Kedua*, berkaitan dengan konteks tersebut, Michael Walzer berbicara tentang jarak kritis terhadap Negara (*critical distance*) tetapi menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil (*civil society*). Jarak kritis bertujuan menolong orang yang melakukan kritik sosial tidak berada di bawah tekanan atau perasaan psikologis apa pun oleh karena keterikatan secara emosional. Demikian juga tidak terpengaruh dengan berbagai macam ideologi yang membungkam suara-suara yang seharusnya bersuara. Termasuk suara kebanyakan yang mempertahankan *status quo* atau bersikap pasif terhadap krisis sosial. Suara kebanyakan sering kali bertentangan dengan pemahaman diri seseorang yang kritis. Kalau gereja dekat dengan Negara (kekuasaan), maka bagi Walzer hal itu sulit untuk melakukan kritik sosial. Hanya ada dua pilihan, terisap/tertelan oleh sistem politik kekuasaan yang sedang

berlangsung, atau terpental keluar dari kekuasaan. Kekuasaan bagi Walzer seperti monster yang buas/ganas, dan jika gereja ada didalamnya tidak melakukan kritik sosial. Hal ini menjadi alasan mengapa gereja-gereja di Jerman turut mendukung Hitler untuk membunuh ras Yahudi dan tidak berpihak pada perdamaian yang diupayakan oleh Bonhoeffer. Demikian juga pada masa orde baru, gereja ada dalam struktur pemerintahan, dekat dengan penguasa, sulit untuk melakukan kritik sosial.

Hal lain yang berkaitan dengan jarak kritis ialah, Walzer menganjurkan kritik yang efektif dengan menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil (*civil society*). Memang ini bukan jalan yang aman, Walzer mengatakan ini sebagai jalan yang sulit dan menakutkan. Akan tetapi bukankah jalan ini merupakan panggilan gereja untuk menderita? Yesus memposisikan diri bersama rakyat biasa Yahudi dan kelompok-kelompok marginal, dan bukan pada pemerintah Romawi. Oleh karena itu Yesus menjadi ancaman bagi pemerintah dan mereka mencari jalan untuk membunuh-Nya hingga mati disalibkan. Kritik sosial Martin Luther juga membuat ia sampai diasingkan. Dietrich Bonhoeffer juga kemudian dibunuh. Akan tetapi tugas dan panggilan gereja bukan ada pada zona nyaman dalam kedekatan dengan penguasa tetapi bersama masyarakat yang marginal, terdiskriminasi, dan mengalami ketidakadilan meskipun harus menderita. Itulah jalan salib. Melakukan kritik sosial dengan melalui jalan salib, bagi Bonhoeffer hal itu merupakan tanggung jawab gereja atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Salah satu fenomena di zaman sekarang ialah ada kelompok yang menyampaikan kritik sosial secara kuat, tetapi isinya mengandung pesan sponsor tertentu dari kelompok yang dominan. Akibatnya masyarakat diadudombakan, bahkan tidak sedikit yang justru terbentur dengan perbedaan arus kritik sosial dari kelompok yang berbeda. Seperti demonstrasi mahasiswa pada waktu lalu yang berujung tindakan anarkis. Hal itu merupakan mental di zaman Orde Baru yang terus dibawa hingga sekarang. Penting untuk membangun gerakan-gerakan mahasiswa bersama rakyat yang lebih relevan di zaman sekarang, dan bebas anarki dalam menyampaikan kritik sosial. Terkadang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu lebih diperjuangkan daripada kepentingan publik. Di era *post-truth* ini, orang tidak lagi melihat apa yang menjadi substansi dari sesuatu yang diperjuangkan, melainkan kepentingan-kepentingan tertentu yang dibalut

dengan teks-teks agama atau jargon-jargon politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dalam perenungan ini, pesan jarak sosial dari Walzer patut diperhatikan untuk dapat menginterpretasi setiap fenomena yang muncul dalam masyarakat, kemudian menilainya dengan baik sehingga kritik sosial yang disampaikan dapat tepat dan membawa kedamaian dan keadilan.

*Ketiga*, Salah satu alasan gereja tidak melakukan kritik terhadap negara ialah tafsir terhadap teks-teks Alkitab yang bersifat tradisional, misalnya terhadap Roma 13 dengan ketaatan mutlak terhadap pemerintah sebab ia adalah wakil Allah. Terlibat memperjuangkan reformasi sebagai perlawanan terhadap pemerintah dan hal ini melanggar kehendak Allah. Oleh karena itu perlu dikembangkan semacam tafsir tandingan, misalnya model tafsir postkolonial. Dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap teks Alkitab, akan turut membentuk cara pandang dan sikap kritik sosial terhadap pemerintah.

*Keempat*, hubungan yang dibangun oleh gereja dan negara bukan dalam relasi dominatif dan hegemonik, melainkan dialogis mutualistis. Seperti yang diupayakan oleh Luther dan Calvin pada masa reformasi gereja. Pemerintah menjamin kehidupan orang kristen dan memberikan perlindungan, sementara warga gereja takut kepada Allah dan melakukan kewajiban-kewajiban dalam negara yang mengikat untuk dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini membuka ruang bagi gereja untuk mengajukan kritik sosial ketika ada kebijakan pembangunan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau kepentingan hajat hidup orang banyak. Suara kenabian gereja perlu diperdengarkan seperti nabi Amos untuk menegakan keadilan, tanpa harus menjadi nabi istana yang memberitakan kebaikan-kebaikan yang palsu dan menindas masyarakat. Gereja juga patut menghindari berbagai sikap hegemoni politik, apalagi menjelang pilkada dengan sejumlah bantuan dari para calon legislatif, maupun partai-partai politik. Sikap skritik sosial yang baik akan membawa perubahan bagi kebaikan tatanan masyarakat. Selain itu gereja perlu menghindari tindakan anarkis dalam mengajukan kritik, sebaliknya menempuh jalur hukum untuk mencapai keadilan. Gereja dapat taat kepada pemerintah jika mendatangkan kebaikan atas manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kesetiaan kepada Tuhan yang harus diutamakan di atas kesetiaan kepada manusia.

Dalam rangka membangun hubungan yang dialogis-mutualis, gereja perlu menjadikan negara sebagai mitra yang dipanggil Allah untuk menyatakan kebaikan bagi manusia untuk mengatasi berbagai persoalan di masyarakat, seperti krisis ekologi, kemiskinan, korupsi, kekerasan atas nama agama, pelanggaran HAM, perdagangan manusia, dsb. Jadi bukan hanya sekedar mempersoalkan hak-hak minoritas dan mencari aman pada pemerintah, tetapi kepentingan publik yang diutamakan. Walzer menegaskan tentang *power*/kapasitas yang harus dikembangkan untuk memperjuangkan persoalan kemanusiaan seperti yang disebut di atas bagi kepentingan banyak orang. Tidak masalah jika gereja menjadi dekat dengan Negara, asal tidak menghilangkan daya kritisnya, serta menjaga hubungan yang dialogis-mutualis di atas. Emanuel Gerrit Singgih juga menyarankan agar kita mengatasi perasaan '*minority complex*' dengan menerima fakta bahwa kita adalah kelompok minoritas, tetapi bukan berarti kita adalah warga kelas dua. Kita bisa aktif berjuang mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan dengan kapasitas/*power* yang kita miliki.<sup>22</sup> Jadi *power*/kapasitas itu yang harus dikembangkan untuk melakukan kritik sosial, bukan berlindung kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Calvin S. "7 Model Kristologi Sosial - Jakarta Barat - lilinkecil." Tokopedia. Accessed April 16, 2022. <https://www.7-model-kristologi-sosial-kalvin-s-budiman>.
- The Calvin 500 Blog. "Calvin's Political Theology in Other Works," October 16, 2008. <https://calvin500blog.wordpress.com/2008/10/16/calvin%e2%80%99s-political-theology-in-other-works/>.
- Dewalt, Michael M. "John Calvin's Practical View of Adoption." Accessed April 16, 2022. [https://www.academia.edu/3688741/John\\_Calvins\\_Practical\\_View\\_of\\_Adoption](https://www.academia.edu/3688741/John_Calvins_Practical_View_of_Adoption).

End, Th van den. *Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas*. BPK Gunung Mulia, n.d.

Ibrahim, Idi Subandy. *Budaya populer sebagai komunikasi: dinamika popscape dan mediascape di Indonesia kontemporer*. Jalasutra, 2007.

“Ini Cara Soeharto Lawan Orang-Orang Yang Mengkritiknya | Merdeka.Com.” Accessed April 14, 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cara-soeharto-lawan-orang-orang-yang-mengkritiknya.html>.

“Korban Kekerasan Resmi Melaporkan Camat Rote Ke Polda NTT, Bupati Rote Ndao Siap Diperiksa – KeizalinNews.Com.” Accessed April 14, 2022. <https://www.keizalinnews.com/hukum-kriminal/korban-kekerasan-resmi-melaporkan-camat-rote-ke-polda-ntt-bupati-rote-ndaosiap-diperiksa/>.

Kustiah, PASTI LIBERTI MAPPAPA. “Kisah Bung Tomo Dipenjarakan Soeharto.” *detiknews*. Accessed April 14, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3065071/kisah-bung-tomo-dipenjarakan-soeharto>.

Singgih, Emmanuel Gerrit. *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 2000.

“Suharto, suara dari Timur: antara ‘diktator sukses’ dan ‘penindas kejam.’” *BBC News Indonesia*, May 22, 2022, sec. Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43513185>.

Sukanto, Amos. “Pelayanan Gereja Di Indonesia Pada Era Reformasi,” 139–61, 2003.

“The KUYPERIAN: Kuyper And Neocalvinist Political Questions.” Accessed April 16, 2020. <http://kuyperian.blogspot.com/2004/11/kuyper-and-neocalvinist-political.html>.

“Two Kingdoms Doctrine.” In *Wikipedia*, March 1, 2022. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two\\_kingdoms\\_doctrine&oldid=943437465](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two_kingdoms_doctrine&oldid=943437465).

Walzer, Michael. *Interpretation and Social Criticism*. Harvard University Press, 1993.

Yewangoe, Andreas Anangguru, Zakaria J. Ngelow, John Campbell-Nelson, and Julianus Mojau. *Teologi politik: panggilan gereja di bidang politik pasca Orde Baru*. Yayasan Oase Intim, 2013.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> PASTI LIBERTI MAPPAPA Kustiah, "Kisah Bung Tomo Dipenjarakan Soeharto," detiknews, accessed April 14, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3065071/kisah-bung-tomo-dipenjarakan-soeharto>.

<sup>2</sup> "Ini Cara Soeharto Lawan Orang-Orang Yang Mengkritiknya | Merdeka.Com," accessed April 14, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cara-soeharto-lawan-orang-orang-yang-mengkritiknya.html>.

<sup>3</sup> "Suharto, suara dari Timur: antara 'diktator sukses' dan 'penindas kejam,'" *BBC News Indonesia*, May 22, 2022, sec. Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43513185>.

<sup>4</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Budaya populer sebagai komunikasi: dinamika popscape dan mediascape di Indonesia kontemporer* (Jalasutra, 2007), 120.

<sup>5</sup> "Korban Kekerasan Resmi Melaporkan Camat Rote Ke Polda NTT, Bupati Rote Ndao Siap Diperiksa – KeizalinNews.Com," accessed April 14, 2022, <https://www.keizalinnews.com/hukum-kriminal/korban-kekerasan-resmi-melaporkan-camat-rote-ke-polda-ntt-bupati-rote-ndao-siap-diperiksa/>.

<sup>6</sup> Michael Walzer, *Interpretation and Social Criticism* (Harvard University Press, 1993), 30.

<sup>7</sup> Walzer, 8-12.

<sup>8</sup> Walzer, 22-23.

<sup>9</sup> Walzer, 31-32.

<sup>10</sup> Walzer, 32.

<sup>11</sup> Th van den End, *Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas* (BPK Gunung Mulia, n.d.), 40-57.

<sup>12</sup> Andreas Anangguru Yewangoe et al., *Teologi politik: panggilan gereja di bidang politik pasca Orde Baru* (Yayasan Oase Intim, 2013), 28-29.

<sup>13</sup> "Two Kingdoms Doctrine," in *Wikipedia*, March 1, 2022, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two\\_kingdoms\\_doctrine&oldid=943437465](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two_kingdoms_doctrine&oldid=943437465).

<sup>14</sup> "Calvin's Political Theology in Other Works," *The Calvin 500 Blog* (blog), October 16, 2008, <https://calvin500blog.wordpress.com/2008/10/16/calvin%e2%80%99s-political-theology-in-other-works/>.

<sup>15</sup> Michael M. Dewalt, "John Calvin's Practical View of Adoption," accessed April 16, 2022, [https://www.academia.edu/3688741/John\\_Calvins\\_Practical\\_View\\_of\\_Adoption](https://www.academia.edu/3688741/John_Calvins_Practical_View_of_Adoption).

<sup>16</sup> Kalvin S. Budiman, "7 Model Kristologi Sosial - Jakarta Barat - lilinkecil," accessed April 16, 2022, <https://www.7-model-kristologi-sosial-kalvin-s-budiman>.

---

<sup>17</sup> Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia* (BPK Gunung Mulia, 2000), 29.

<sup>18</sup> Singgih, 10-11.

<sup>19</sup> Amos Sukamto, "Pelayanan Gereja Di Indonesia Pada Era Reformasi," 2003, 139.

<sup>20</sup> Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*, 8-25.

<sup>21</sup> "The KUYPERIAN: Kuyper And Neocalvinist Political Questions," accessed April 16, 2022, <http://kuyperian.blogspot.com/2004/11/kuyper-and-neocalvinist-political.html>.

<sup>22</sup> Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*, 22.